

**Pelaksanaan Progam Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang**

Oleh:

Asri Nurul Utami, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Sadar wisata and Sapta Pesona program is a program that aims to move the area to be ready to receive tourists, in the form of community empowerment through conservation activities carried out by Disbudpar Pokdarwis Semarang to create a conducive climate for growth and development of tourism, especially in Sub Kandri. The purpose of this research is to know how the activity implementation of preservation Pokdarwis in Kandri Village based on technical guidelines of the implementer activity, where the succes measurement is seen in three things those are activity, creation effort and coordination institution. The next purpose was to describe the motivating factors and demotivating of activity based on Grindle'theory. The method which used is descriptive qualitative method. The data collection techniques which are done with observation, interview, documentation and the literature study. The informants of this research is staff guidance section of the community Disbudpar of Semarang City and members of Pokdarwis Sukomakmur and Pandanaran in Kandri Village. The result of this research shows the implementation has done well based on technical guidelines of activity, eventhough the result of achievement is not maximum. The factors which be demotivated are the achievement of degrees changed, available resource particulary for human resource quantity and budget, including the loyalty level and response of target group. The writer's suggestions are needed to use of available field, specific allocation budget and strick warning to pokdarwis member which obey the role.

Key words : implementation, resources, society empowerment

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata di Indonesia sekarang ini telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting dan diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Disamping menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga merupakan sarana yang menarik untuk mendorong

perkembangan beberapa sektor, antara lain: mengubah atau menciptakan usaha-usaha baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata, memperluas pasar barang-barang lokal, memberikan dampak positif pada tenaga kerja dan mempercepat sirkulasi ekonomi dalam suatu daerah destina wisata, dengan demikian akan memperbesar *multiplier effect* untuk kepentingan bersama terutama masyarakat lokal dari destinasi

wisata tersebut. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata juga tidak terlepas dari adanya kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam bidang pariwisata ini, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga sumber daya manusia tersebut merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan pariwisata. Dengan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan pariwisata maka keberhasilan pengembangan pariwisata akan meningkat. Keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata akan membawa tuntutan bagi partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama dari *stakeholders* terkait dengan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan pariwisata.

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman pariwisata kepada masyarakat yaitu melalui Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Program kampanye nasional ini diusulkan pada gerakan *Visit Indonesia Year* tahun 1991 dan merupakan salah satu aspek mendasar bagi keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Selain itu Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona ini berfungsi menggerakkan daerah agar berupaya menyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini juga mendorong daerah-daerah yang berpotensi menjadi tujuan wisata namun belum dikenal masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk berkunjung.

Sadar wisata sendiri merupakan suatu istilah dalam kepariwisataan yang artinya tahu, mengerti dan melakukan berbagai macam kegiatan wisata dan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu Sadar wisata merupakan suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan

di suatu destinasi atau wilayah. Sedangkan Sapta Pesona merupakan jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata yang berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona dilambangkan seperti Matahari bersinar sebanyak tujuh unsur yang terdiri atas unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sapta Pesona merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan dalam setiap produk pariwisata sehingga dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Negara/daerah kita (Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, 2008).

Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona ini berupa pengembangan aspek kepariwisataan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara mengenalkan dan membuka *mindsite* masyarakat mengenai konsep Sadar Wisata, serta memberikan dorongan motivasi yang kemudian direalisasikan dengan konsep Sapta Pesona. Maka dari itu dibutuhkan kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, yang peduli akan keberadaan dan pelestarian kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Kelompok-kelompok yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan budaya inilah yang disebut dengan Kelompok Sadar Wisata atau disingkat POKDARWIS.

Untuk mendukung terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan perkembangan kepariwisataan di Kota Semarang tersebut, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang telah membuat berbagai program pengembangan destinasi kepariwisataan, dimana program nasional kampanye sadar wisata dan sapta pesona digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Semarang. Salah satu

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam upaya pelaksanaan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona ini yaitu dengan membangkitkan serta melestarikan kembali kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan adanya momentum gerakan Visit Jateng 2013 yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menumbuhkan kembangkan sadar wisata bagi masyarakat sehingga tercipta sapta pesona di setiap obyek wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Semarang dalam upaya menjalankan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata dengan menggunakan petunjuk teknis sadar wisata dan sapta pesona didalam pelaksanaannya yaitu memberikan kegiatan, pembinaan dan koordinasi kepada pokdarwis di Kota Semarang

Pokdarwis pandanaran di Kelurahan Kandri merupakan pokdarwis yang keberadaannya mampu bertahan lama semenjak tahun 1992 yang kemudian berkembang menjadi dua pokdarwis yaitu pokdarwis sukumakmur. Kelurahan Kandri merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak di Kota Semarang apabila dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Ditambah lagi dengan keberadaan adanya Desa Wisata Kandri yang diresmikan pada tahun 2014, diharapkan dapat memperkenalkan potensi yang terdapat di desa ini ke masyarakat luas.

Keberhasilan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona melalui pelestarian pokdarwis khususnya di Kelurahan Kandri salah satunya dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Namun dengan potensi yang cukup besar di Kelurahan Kandri tersebut jika dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Kota Semarang jumlah wisatawan yang berkunjung masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini dirasakan belum berjalan optimal sebab potensi wisata yang cukup besar dimiliki oleh Kelurahan Kandri khususnya di Desa Wisata Kandri belum dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat

sehingga jika dibandingkan dengan daya tarik wisata lainnya di Kota Semarang dari segi jumlah pengunjung masih tergolong rendah. Selain itu berdasarkan fenomena yang ada masyarakat di Kelurahan Kandri sebagian besar merupakan petani yang lahan mereka sekarang sudah dijadikan sebagai tempat pembuatan waduk jatibarang sehingga dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki mengenai kepariwisataan pada saat itu mereka mau tidak mau harus beralih profesi sebagai pelaku wisata dengan seiring dijadikannya daerah mereka menjadi desa wisata. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya keberadaan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona diadakan disini dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pelestarian pokdarwis.

Maka dari itu didalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai **Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang** sebagai bentuk upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona di Kota Semarang.

B. TUJUAN

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

C. TEORI

1. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2013:08) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Thomas S.Kuhn (dalam Syafiie 2006:26) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2013:28-30) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu :

1. Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937).
2. Dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926).
3. Administrasi negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).
4. Administrasi negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970).
5. Administrasi Negara sebaga Ilmu Administrasi Negara.

Paradigma yang dikemukakan oleh Nicholas Henry menekankan pada pencarian induk daripada ilmu administrasi publik itu sendiri yang berkaitan erat dengan ilmu politik, sedangkan paradigma NPM sudah menunjukkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern, dan paradigma NPS menekankan pada kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kepada publik secara adil.

2. Kebijakan Publik

Thomas R Dye (dalam Indiahono, 2009 : 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Proses pembuatan kebijakan publik

merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn (dalam Budi Winarno, 2014:35) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Budi Winarno, 2014:177). Dalam hal ini penulis akan mengkaji Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, agar dapat melihat bagaimana program tersebut dilaksanakan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi program atau kegiatan berdasarkan teori Merilee. S Grindle dengan asumsi bahwa variabel-variabel dalam teori tersebut relevan dengan kondisi dilapangan yaitu

Isi Kebijakan :

1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dilibatkan

Lingkungan Kebijakan :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa Ketaatan dan daya tanggap

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan, dalam memilih informan digunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumen, dan studi pustaka.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Suatu kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, maka dari itu dalam implementasi kegiatan pelestarian pokdarwis ini akan dilihat proses berjalannya yang didasarkan pada fenomena implementasi yang disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksana kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang sadar wisata yang digunakan oleh disbudpar. Adapun pengukuran keberhasilan implementasi program tersebut dilihat dari tiga hal yakni kegiatan, upaya pembinaan, dan koordinasi kelembagaan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan dalam Program Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona pada Pokdarwis di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Berdasarkan pedoman petunjuk teknis sadar wisata dan sapta pesona dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang sadar wisata, terdapat enam kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis yaitu

a) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.

Pengetahuan dan wawasan telah diberikan kepada anggota pokdarwis di Kelurahan Kandri

dilakukan satu kali setiap tahunnya oleh Disbudpar dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona yang didalamnya juga diberikan berbagai macam pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai peran masyarakat serta mengenai hospitality, pemandu wisata, pembuatan souvenir, kerajinan, kuliner, maupun paket-paket wisata serta memberikan pengetahuan wawasan sesuai dengan masing-masing seksi yang ada didalam pokdarwis dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun studibandung.

Dengan adanya kegiatan yang telah diberikan selama ini ternyata cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota pokdarwis baik pokdarwis Sukomakmur maupun Pandanaran di Kelurahan Kandri dalam bidang pariwisata dan jauh lebih berkembang, salah satunya ditunjukkan dari adanya penguasaan para anggota pokdarwis sukomakmur di Desa Talun Kacang dalam mengelola objek wisata perahu di Waduk Jatibarang. Hal ini ditunjukkan pula dari progres perkembangan pokdarwis Sukomakmur dan Pandanaran yang jauh lebih baik dari pokdarwis lainnya di Kota Semarang karena sudah mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kelurahan Kandri jika dibandingkan dengan desa wisata lainnya.

b) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.

Kegiatan yang telah diberikan dilakukan setiap satu bulan sekali dengan kegiatan yang berbeda yaitu berupa pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan SDM, manajemen organisasi pokdarwis, peningkatan kemampuan dalam hal pembuatan souvenir, kerajinan tangan, membuat, sablon, kuliner, seni tari dan usaha pariwisata lainnya yang dapat mendukung kepariwisataan di Kelurahan Kandri.

Maka dari itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah diberikan ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh anggota pokdarwis baik sukomakmur maupun pandanaran, hal ini bisa dilihat dari para anggota yang sudah terampil dalam hal mengorganisir kelompok, menjadi pemandu wisata, menghasilkan kerajinan tangan dan kuliner,

menciptakan paket-paket wisata yang menarik dan sudah dimilikinya sertifikasi pada para anggota perahunya maupun pemandu wisatanya sehingga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari adanya kegiatan ini.

c) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan didaerahnya.

Bentuk kegiatan yang diberikan pokdarwis kepada masyarakat merupakan hasil dari pembinaan maupun pelatihan yang diberikan oleh dinas, dengan demikian tugas pokdarwis disini tinggal mensosialisasikan apa yang mereka peroleh untuk disampaikan kepada masyarakat melalui seksi-seksi yang ada di pokdarwis. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu membuka *mindsite* masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai sadar wisata dan sapta pesona serta penerapannya, pelatihan kuliner dan kerajinan, menegnai *hospitality*, menyiapkan rumah warga untuk dijadikan *home stay* bagi wisatawan dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pokdarwis. Namun sosialisasi yang diberikan oleh pokdarwis ini dirasakan belum seluruhnya menyentuh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kandri.

d) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan sapta pesona.

Dalam mewujudkan ketujuh unsur sapta pesona baik pokdarwis sukumakmur maupun pandanaran beserta masyarakat kandri sudah melakukan berbagai macam kegiatan antara lain seperti dalam hal keamanan dan ketertiban sudah ada siskamling dan TIM Anti TANKER (Anti Kejahatan dan Kekerasan) di Desa Wisata Kandri, kemudian unsur bersih, sejuk, indah diwujudkan dengan kegiatan kerja bakti, menanam pohon dan tanaman, lalu unsur ramah dan kenangan diwujudkan dari segi pelayanan masyarakatnya dalam menyambut wisatawan sehingga nantinya wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung. Namun didalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat beberapa kendala dari segi sarana prasarana kebersihan yang belum

memadai dan tingkat kepedulian masyarakat terutama pada lingkungan yang masih kurang mendukung perwujudan unsur sapta pesona ini.

Dengan berbagai upaya perwujudan sapta pesona yang telah dilakukan memberikan dampak perubahan yang cukup baik pada kondisi kualitas lingkungan dan daya tarik wisata yang ada di Kelurahan Kandri apalagi setelah daerah kandri ditetapkan menjadi desa wisata berbagai fasilitas pendukung seperti papan petunjuk lokasi sudah ada, kondisi lingkungan pun sudah tertata baik dan terjaga, selain itu berbagai macam daya tarik wisata juga sudah banyak yang bermunculan dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kelurahan Kandri baik melalui paket-paket wisata yang mereka susun maupun inovasi baru seperti desa wisata aquaponik kandri yang ada di RW IV.

e) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.

Bentuk pelayanan informasi kepariwisataan yang dilakukan oleh Pokdarwis Sukumakmur dan Pandanaran di Kelurahan Kandri sudah dilakukan dengan baik dan cukup efektif dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kelurahan Kandri yaitu dalam bentuk promosi dari mulut ke mulut, kemudian dalam bentuk brosur maupun flyer, papan informasi dan sekarang ini sangat gencar dilakukan promosi melalui media sosial yang jangkauannya lebih luas. Selain itu juga ada supporting dari pemerintah maupun swasta melalui forum jejaring desa wisata, kemudian dibantu juga dari mahasiswa KKN yang ikut mempromosikan melalui media sosial dengan membuat video pendek mengenai paket-paket wisata di desa wisata kandri dan juga membantu anggota pokdarwis dalam pembuatan brosur. Melalui media sosial inilah yang dirasa paling efektif untuk mendatangkan pengunjung.

Namun didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala baik di pokdarwis Sukumakmur maupun Pandanaran sehingga dirasakan masih belum maksimal didalam melakukan promosi yaitu kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh anggota dalam penguasaan teknologi dan terbatasnya jumlah SDM yang menangani bagian promosi

f) Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan setempat.

Pokdarwis memiliki sarana khusus dalam menyampaikan masukan-masukannya dan biasanya baik pokdarwis Sukomakmur maupun Pandanaran menyampaikannya langsung kepada Disbudpar pada saat ada pertemuan khusus atau pada saat dinas melakukan kunjungan langsung dilapangan. Selain itu juga terdapat Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah yang merupakan tempat berkumpulnya seluruh pokdarwis se-jawa tengah, dimana setiap bulan diadakan pertemuan khusus untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan sharing-sharing pemberian informasi baik dari vertikal maupun horisontal dan juga ada kluster pariwisata atau FEDEP yang diadakan oleh pemkot atau Bappeda. Melalui forum ini sangat dimanfaatkan sekali oleh pokdarwis sukomakmur maupun pandanaran dalam menyampaikan masukan-masukannya kepada pemerintah. Namun berdasarkan hasil penelitian respon yang diterima dari pemerintah dalam hal ini Disbudpar Kota Semarang cukup lambat karena harus melalui prosedur-prosedur tertentu dan baru bisa diimplementasikan setelah satu atau dua tahun, jadi kemungkinan jika respon yang diberikan itu cepat sifatnya terjadi hanya pada situasi yang penting saja.

2. Upaya-Upaya Pembinaan dalam Progam Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona pada Pokdarwis di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh dinas kepada pokdarwis berupa pembinaan langsung maupun tak langsung sudah dilakukan dengan baik dan cukup efektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun bentuk pembinaan langsung dilakukan secara tatap muka langsung dengan pokdarwis dan pembinaan tidak langsung melalui pemanfaatan media massa oleh dinas yang diagendakan setiap bulannya mulai bulan juli hingga desember dengan berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan-pelatihan, perlombaan antar pokdarwis dan gebyar sapta pesona.

Pokdarwis sukomakmur maupun pandanaran juga sering menerima pembinaan dari unsur-unsur pembina lainnya dalam bentuk

fasilitasi atau pendukung seperti dari kementerian, provinsi, SKPD-SKPD, institusi atau universitas, dan para pemerhati pariwisata lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan skema pembinaan pokdarwis pada buku pedoman petunjuk teknis sadar wisata dan sapta pesona yang tidak hanya dari dinas tetapi juga dari unsur pembina lainnya. Adapun pembinaan yang sudah diberikan seperti pelatihan spiritual ESQ, kerajinan, kuliner, kesenian, pembuatan souvenir, dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dibidang usaha pariwisata.

Namun didalam implementasi selanjutnya dilapangan pembinaan yang telah diberikan itu tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat kandri lainnya sehingga belum menyentuh kesemua masyarakat dan hanya sebatas pada anggota pokdarwis saja yang mendapatkannya. Selain itu pembinaan yang diberikan khususnya yang berasal dari Disbudpar dirasakan oleh anggota pokdarwis baik sukomakmur maupun pandanaran sekarang ini sudah tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan disana karena rata-rata pembinaan yang diberikan itu sama dan sudah pernah diberikan.

3. Koordinasi Kelembagaan dalam Pelaksanaan Progam Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona melalui Pelestarian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Koordinasi kelembagaan yang dilakukan dalam kegiatan pelestarian pokdarwis khususnya di Kelurahan Kandri sudah dilakukan dengan baik diberbagai tingkatan meskipun didalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih ditemui beberapa kendala, mulai dari tingkat pusat yaitu kementerian kebudayaan dan pariwisata, tingkat provinsi melalui dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi jawa tengah, tingkat kota melalui dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang yang masing-masing tingkatan juga melakukan koordinasi dengan usaha jasa pariwisata maupun asosiasi terkait pariwisata lainnya yang selanjutnya diteruskan kepada Pokdarwis kemudian diteruskan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Kandri.

Bentuk koordinasi kelembagaan yang telah dilakukan baik ditingkat pusat maupun provinsi yaitu berupa pembinaan yang diberikan kepada dinas selaku pembina langsung dan kepada pokdarwis sebagai sasaran utamanya yang dilakukan pada awal tahun dengan tiga kali kegiatan, sedangkan dari provinsi juga melakukan koordinasi dalam bentuk pembinaan kepada pokdarwis sebanyak satu kali kegiatan berupa kegiatan peningkatan SDM.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk tahun 2016 ini selain melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya seperti SKPD-SKPD dan swasta untuk menunjang kegiatan pelestarian pokdarwis dalam memberikan pembinaan kepada pokdarwis, dinas juga akan melakukan penilaian atau evaluasi kepada pokdarwis baik sukumakmur maupun pandanaran yang selama kurang lebih empat tahun sudah dibina.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pokdarwis sebagai target kegiatan dilakukan pada saat rapat rutin bulanan dengan seluruh anggota pokdarwis untuk membahas kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Tetapi didalam pelaksanaannya rapat rutin bulanan yang diagendakan jarang dilakukan karena sifatnya fleksibel hanya dilakukan pada saat ada kegiatan saja dan kegiatan yang dilakukan kurang melibatkan semua warga sehingga peran warga menjadi kurang.

Selain itu pokdarwis baik sukumakmur maupun pandanaran kurang melakukan koordinasi satu sama lain maupun dengan pokdarwis lainnya yang ada di desa wisata seperti nongkosawit dan wonolopo sehingga masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan paket wisatanya.

B. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Kegiatan Pelestarian Kelompok Sadar Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

1) Kepentingan yang dipengaruhi

Sri Suwatri (2009:86) menjelaskan bahwa, kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi implementasi kegiatan pelestarian kelompok sadar wisata dan sapta pesona di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara political dilapangan adalah melalui isu strategis pengembangan destinasi pariwisata dengan tujuan memberdayakan masyarakat yaitu masyarakat di Kelurahan Kandri dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya yang diberikan melalui kegiatan pelestarian kelompok sadar wisata. Maka dari itu disini kepentingan yang sangat dipengaruhi yaitu masyarakat dan kalau ada kepentingan-kepentingan lainnya seperti dari pemerintah maupun swasta hanya dalam bentuk pemberian pembinaan maupun bantuan sebab kebijakan atau program yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kepentingan yang dipengaruhi merupakan **faktor pendorong** berjalannya program karena tidak ada kepentingan lain yang mempengaruhi kecuali hanya untuk kepentingan masyarakat kandri.

2) Jenis Manfaat yang diperoleh target group

Sri suwatri (2009:87) menjelaskan bahwa, program yang memberikan manfaat terhadap banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.

Seiring dengan berjalannya berbagai macam kegiatan yang telah diberikan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang maupun intansi lainnya telah memperoleh dukungan dari para anggota pokdarwis maupun masyarakat kandri. Hal tersebut dikarenakan keberadaan pokdarwis di Kelurahan Kandri ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kandri sebab sebagian besar masyarakat khususnya RW I, II, III yang dulu merupakan petani sekarang harus beralih profesi dikarenakan lahan mereka terkena proyek pembuatan waduk jatibarang. Selain itu dengan adanya potensi wisata yang ada membuat kelurahan kandri diangkat menjadi desa wisata sehingga masyarakat mau tidak mau harus beralih profesi sebagai pelaku wisata.

Leo Agustino (2014:155) juga menjelaskan bahwa, dalam suatu kebijakan atau program harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Manfaat ekonomi dan sosial dari program ini dapat dilihat dari pelaksanaannya yang sesuai dengan tujuan dan harapan dari diadakannya program. Meskipun belum dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh anggota pokdarwis maupun masyarakat di Kelurahan Kandri namun sebagian besar sudah bisa dirasakan, diantaranya bagi pengurus maupun anggota pokdarwis yaitu menambah jejaring dengan pokdarwis lainnya yang ada di Jawa Tengah yang terwadah dalam suatu forum yang dinamakan forum komunikasi desa wisata Jawa Tengah, menambah pengalaman dan wawasan, pendapatan tambahan, serta dengan adanya pokdarwis dan koperasi yang sudah berbadan hukum mempermudah anggota dalam menunjang kegiatannya. Selain itu bagi masyarakat di Kelurahan Kandri juga sebagai penerima dampak langsung maupun tak langsung dari kegiatan ini. Dengan demikian jenis manfaat yang diperoleh *target group* merupakan **faktor pendorong** pelaksanaan program.

3) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Leo Agustino (2014:155) menjelaskan bahwa setiap kegiatan mempunyai target yang hendak dicapai. Sama halnya dengan penelitian ini, kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri ini juga mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Adapun tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka dari segi perekonomian melalui kegiatan-kegiatan pariwisata yang dilakukan. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kelurahan Kandri melalui penerapan *sapta pesona*.

Sayangnya kendala yang terjadi di lapangan adalah tujuan dan harapan dari kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri belum berjalan efektif. Hal tersebut dirasakan langsung oleh anggota pokdarwis maupun masyarakat kandri. Mereka merasakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan infrastruktur penunjang desa wisata karena berdasarkan kondisi dilapangan belum ada ciri pembeda

khusus terutama dari segi infrastruktur yang membedakan antara desa wisata mereka dengan desa yang tidak menyanggah sebagai desa wisata. Sri Suwitri (2009:87) menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang bersifat jangka panjang serta menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat akan cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

Adanya kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri ini tentunya mendapat tanggapan dari masyarakat di Kelurahan kandri. Tanggapan yang didapat yaitu berupa respon yang baik dari masyarakat kandri karena dari segi perubahan perilaku masyarakat dari semula terbiasa dengan kegiatan bercocok tanam sekarang sudah mulai terbiasa menjadi pelaku wisata untuk menyambut wisatawan meskipun belum menyeluruh serta dari segi manfaat ekonomi dan lingkungan sudah dirasakan langsung manfaatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan **faktor penghambat** berjalannya kegiatan karena didalam pencapaiannya belum terealisasi dengan maksimal.

4) Kedudukan Pengambilan Keputusan

Sri Suwitri (2009:87) menjelaskan bahwa, semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasinya program, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat didalamnya. Faktor ini menjelaskan mengenai ketepatan suatu program atau kegiatan.

Kegiatan pelestarian pokdarwis yang dilaksanakan di Kelurahan Kandri ini dirasakan tepat keberadaannya karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga mampu menjawab persoalan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dari kondisi masyarakat pada saat itu yang membutuhkan pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan *skill dan ketrampilan* mereka khususnya dibidang kepariwisataan karena mereka dulunya sebagian besar merupakan petani karena lahan mereka tergenang air oleh waduk jatibarang sehingga masyarakat mau tidak mau beralih profesi menjadi pelaku wisata untuk menunjang

perekonomian mereka dan juga seiring dengan diangkatnya Kelurahan mereka menjadi Desa Wisata.

Dengan demikian kedudukan pengambilan keputusan merupakan **faktor pendorong** dalam implementasi kegiatan pelestarian di Kelurahan Kandri karena keberadaan pokdarwis disini sangat dirasakan penting untuk mengembangkan kemampuan SDM masyarakat guna mendukung keberadaan desa wisata kandri.

5) Pelaksana-pelaksana kegiatan

Dalam Sri Suwatri (2009:98), dijelaskan bahwa kemampuan pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas, sangatlah mendukung keberhasilan implementasi program.

Pelaksana-pelaksana kegiatan sudah diketahui jelas mengenai siapa saja yang terlibat didalamnya mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat semuanya cukup berperan dalam mendukung berjalannya kegiatan. Selain itu kompetensi dan komitmen yang dimiliki oleh disbudpar selaku pembina langsung pokdarwis dirasakan cukup tinggi karena dilihat dari pengalaman dalam menangani pokdarwis hampir 8 tahun lamanya dan kesungguhan dinas dalam memotivasi dan membuka mindsite masyarakat di Kelurahan Kandri mengenai kepariwisataan hingga masyarakat termotivasi untuk menjadikan wilayahnya menjadi desa wisata yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Desa Wisata untuk Kelurahan Kandri dan diangkatnya pokdarwis pandanaran ketingkat kelurahan yang diikuti keluarnya SK Pokdarwis Pandanaran.

Sedangkan dari anggota pokdarwis baik pandanaran maupun sukumakmur dari segi kompetensi dirasa sudah cukup mendukung meskipun belum seluruhnya karena anggotanya masih dalam proses pengembangan sdm dan hanya ada beberapa saja yang aktif. Selain itu anggota pokdarwis juga memiliki tekad dan komitmen yang tinggi yang mau terus belajar dan bekerja keras untuk memajukan daerahnya meskipun semuanya masih dilakukan dengan swadaya sendiri dan hanya beberapa anggota saja yang berkompeten aktif terjun langsung dilapangan. Dengan demikian pelaksana-

pelaksana program merupakan **faktor yang mendorong** berjalannya implementasi kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri.

6) Sumber-sumber daya yang tersedia

Sri Suwatri (2009:88) menjelaskan bahwa, tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri, dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik dinilai dari kompetensi, komitmen dan sikap dukungan para pelaksana kegiatan. Meskipun seperti itu, masih ditemukan kendala dilapangan dari kuantitas sumber daya manusianya yang dirasa masih kurang.

Leo Agustino (2014:155) menjelaskan bahwa, pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi sebuah program atau kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia saja tetapi juga sumber daya finansial.

Kegiatan pelestarian pokdarwis ini adalah berasal dari APBD Kota Semarang. Pada pelaksanaannya dana tersebut masih dirasa kurang, seperti halnya yang terjadi dilapangan yaitu anggota pokdarwis sukumakmur dan pandanaran didalam menjalankan kegiatannya masih dilakukan dengan swadaya sendiri dari para anggotanya karena anggaran dari dinas diwujudkan dalam bentuk sosialisasi maupun pembinaan kepada pokdarwis.

Ketersedian sarana dan prasarana yang ada sekarang ini sudah cukup mendukung pokdarwis sukumakmur dan pandanaran dalam menjalankan kegiatan seperti jalan dan jembatan menuju lokasi wisata sudah cukup lebar dan halus, listrik dan saluran air sudah tertata, sudah terdapatnya *home stay*, tempat pertunjukan seni, pusat informasi dan lain sebagainya, meskipun belum tersedia lengkap seluruhnya karena masih dalam proses pengadaan dan dalam melengkapi sarana prasarana yang ada ini masih dilakukan dengan swadaya sendiri juga berupa bantuan dari beberapa pihak tetapi tidak terlalu menghambat berjalannya kegiatan. Selain itu berdasarkan kondisi dilapangan keberadaan desa wisata kandri ini juga sudah didukung dengan

aksesibilitas menuju lokasi yang cukup baik sehingga dapat mempermudah wisatawan untuk datang berkunjung. Selain dukungan SDM, finansial, dan sarana prasarana yang memadai didalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis terdapat dukungan lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini yaitu tersedianya sumber daya alam yang memadai.

Disimpulkan bahwa sumber-sumber yang dapat dijadikan **faktor pendukung** dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis ini berasal dari ketersediaan sarana prasarana dan aksesibilitasnya, kemudian dari potensi alam, wisata dan seni tradisi budaya yang ada di Kelurahan Kandri. Sedangkan sumber daya yang lainnya yang menjadi **faktor penghambat** dalam berjalannya kegiatan berasal dari kuantitas para pelaksana program khususnya pada seksi bimbingan masyarakat dan anggota pokdarwis serta terbatasnya sumber dana anggaran yang dimiliki.

7) **Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat**

Leo Agustino (2014:156) menjelaskan bahwa, lingkungan dimana suatu program dilaksanakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri, lingkungan yang menjadi penentu keberhasilan program tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Pokdarwis di Kelurahan Kandri yaitu Pokdarwis Sukomakmur dan Pandanaran. Kedua pelaksana tersebut menjadi penentu keberhasilan dari pelaksanaan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona melalui pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Suwitri (2009:88) menjelaskan bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementator akan menentukan keberhasilan implementasi, apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu kebijakan, maka para implementator akan menyusun strategi agar dapat memenangkan persaingan yang terjadi terhadap implementasi, sehingga output suatu program atau kegiatan tersebut dapat dinikmati.

Pokdarwis sukumakmur maupun pokdarwis pandanaran memiliki strategi khusus untuk menunjang berjalannya kegiatan mereka

yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan dinas maupun instansi lainnya untuk memperoleh dukungan baik fisik maupun non fisik. pokdarwis sukumakmur maupun pandanaran sangat menjaga hubungan yang baik dengan Disbudpar karena dinas sangat berperan besar dalam pengembangan pokdarwis, kemudian sejak awal pembentukan pokja perahu sukumakmur sudah melakukan kerjasama dengan Tlogosarangan yang berkaitan dengan pelatihan pengemudi perahu dan pembelian perahu, hubungan yang terjalin diantara kedua pihak tersebut sangat baik hingga sekarang karena adanya rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain dalam menjalankan kerjasama yang juga melibatkan pihak swasta. Pokdarwis pandanaran juga melakukan kerjasama yang baik dengan pihak BUMN, BUMD maupun CSR guna mendukung pembangunan *display* prodak-prodak UMKM mereka. Maka dari itu bentuk kerjasama dan dukungan tersebut sangat membantu pokdarwis dalam menjalankan kegiatannya.

Selain pokdarwis dalam hal ini Disbudpar Kota Semarang juga telah menggunakan strategi yang efektif untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis karena didalam memberikan pembinaan tidak bisa dilakukan sendiri oleh dinas karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Adapun strateginya yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan SKPD-SKPD lainnya dan swasta sehingga apabila mereka ingin memberikan pembinaan atau pelatihan terhadap pokdarwis bisa langsung saja diberikan kepada pokdarwis tanpa harus melalui disbudpar maupun prosedur yang ketat, tetapi yang terpenting komunikasi dengan dinas tetap dilakukan. Dengan demikian kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat merupakan **faktor pendukung** berjalannya program.

8) **Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa**

Suwitri (2009:88) menjelaskan bahwa, implementasi suatu program atau kegiatan tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Dalam hal ini strategi penyelesaian konflik secara tidak langsung menilai ciri-ciri dari institusi dan rezim dimana kegiatan tersebut diimplementasikan, apakah implementasi

kegiatan tersebut berada pada lingkungan otoriter atau demokratis.

Dalam pelaksanaan kegiatan pokdarwis di Kelurahan Kandri ini pada awal pembentukan pokdarwisnya sempat menimbulkan konflik antar anggotanya dimana setelah pokdarwis pandanaran diangkat ketingkat Kelurahan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai strategi tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat kemudian melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan menggunakan pedoman petunjuk pelaksana sebagai dasarnya.

Pokdarwis juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada organisasinya. Konflik yang berasal dari dalam biasanya muncul akibat dari adanya rasa iri atau ego yang muncul pada anggotanya yang mengakibatkan munculnya ketidakpedulian antar anggota maka dari untuk menyelesaikan persoalan ini biasanya pokdarwis melakukan musyawarah dengan mengumpulkan semua anggota pokdarwis dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Sedangkan untuk menghadapi permasalahan yang berasal dari luar organisasi, pokdarwis tidak memerlukan strategi khusus karena secara tidak langsung dengan adanya ancaman dari luar ini justru membuat anggotanya lebih bersatu dan solid untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatannya karena ada rasa tidak mau tersaingi dengan pokdarwis lainnya. Dengan demikian karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa merupakan **faktor pendorong** dalam pelaksanaan program.

9) Tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran

Leo Agustino (2014:156) menjelaskan bahwa, hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang perlu dijelaskan dalam poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Bahwa pokdarwis sukumakmur dan pandanaran sudah memiliki aturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur berjalannya organisasi yaitu dalam bentuk AD/ART tetapi pelaksanaannya dilapangan aturan tersebut belum

dilaksanakan secara maksimal oleh para anggotanya. Ditunjukan dari tingkat kepatuhan dan keaktifan anggota pokdarwis baik Sukumakmur maupun Pandanaran dirasakan masih kurang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan. Hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa anggota saja yang benar-benar patuh dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tugasnya bahkan beberapa anggota harus merangkap jabatan atau peran karena terbatasnya jumlah anggota yang aktif dan kebanyakan anggota kurang memprioritaskan perannya dipokdarwis karena sifatnya yang hanya sebagai sambilan karena mereka juga memiliki pekerjaan diluar pokdarwis.

Selain itu Suwitri (2009:88) menjelaskan agar tujuan suatu program dapat tercapai, maka implementator harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari penerima manfaat yang ada di lingkungannya.

Daya tanggap pokdarwis dalam mengadakan kegiatan yang ditujukan kemasyarakat kurang memperhatikan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, selain itu pembinaan yang telah diberikan dinas juga kurang disosialisasikan kembali kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi dan daya tanggap masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pokdarwis dirasakan masih kurang yang dapat menjadi **faktor penghambat** berjalannya program. Meskipun masih kurang, untuk kegiatan yang sifatnya event besar atau acara tradisi budaya partisipasi dan daya dukung masyarakat cukup tinggi sehingga hal inilah yang perlu dilakukan evaluasi kedepannya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan program kampanye sadar wisata dan sapta pesona melalui kegiatan pelestarian pokdarwis di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang bisa dilihat dalam ketiga hal sesuai dengan petunjuk teknis program. Di dalam tiga hal tersebut yaitu kegiatan, upaya pembinaan, dan koordinasi kelembagaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis program namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yaitu kurangnya kemampuan penguasaan IT

yang dimiliki oleh anggota Pokdarwis dalam melakukan promosi, kurang melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kandri secara menyeluruh, kurang melakukan koordinasi antar pokdarwis, dan pembinaan yang diberikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pokdarwis.

2. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam hal ini. Faktor pendorongnya adalah kepentingan kegiatan hanya ditujukan untuk masyarakat kandri. Manfaat dari kegiatan sudah dirasakan oleh pokdarwis dan masyarakat kelurahan kandri baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan kegiatan ini tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kompetensi dan komitmen yang dimiliki *stakeholders* yang berperan cukup baik. Ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, sumber daya alam, seni budaya, dan potensi lainnya di Kelurahan Kandri cukup mendukung. Terjalannya kerjasama dan hubungan yang baik dari para *stakeholders* serta karakteristik dalam penyelesaian masalah cukup baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak memadainya lahan parkir dan sentralisasi UMKM di desa wisata kandri. Berjalannya kegiatan tidak ditunjang oleh jumlah SDM yang memadai. Terbatasnya jumlah anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Tingkat kepatuhan dan keaktifan anggota pokdarwis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya belum sesuai dengan aturan serta partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang diberikan oleh pokdarwis juga belum maksimal.

B. SARAN

1. Untuk pelaksanaan program khususnya dalam hal penguasaan IT perlu dilakukan pelatihan khusus dari Disbudpar atau pokdarwis sendiri setiap satu bulan sekali kepada anggota pokdarwis khususnya bagian promosi. Dalam hal pembinaan, Disbudpar Kota Semarang perlu melakukan kumpulan rutin dan evaluasi kegiatan sebanyak satu sampai dua kali setahun dengan pokdarwis di Kelurahan Kandri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan agar pembinaan yang diberikan nantinya sesuai. Selain itu pokdarwis

sukomakmur dan pandanaran harus lebih aktif dan intens untuk bekerjasama dalam menjalankan paket-paket wisata yang dimiliki dengan mengesampingkan ego masing-masing serta perlu adanya pendidikan sadar wisata dan sapta pesona untuk semua warga baik itu warga usia TK, SD, SMP hingga usia dewasa yang dilakukan secara kontinue bulanan atau tahunan.

2. Terhadap faktor pendorong dan penghambat perlu adanya upaya penanganan lebih lanjut agar meningkatkan daya dorong atau mengurangi hambatan.
 - a. Untuk meningkatkan daya dorong khususnya sumber daya wisata perlu adanya penambahan daya tarik wisata seperti membuat spot khusus untuk berfoto dengan latarbelakang alam pedesaan kandri atau membuat tempat khusus dengan menampilkan kebudayaan dan hasil kerajinan tangan khas desa wisata kandri, serta secara intens mengadakan kegiatan pagelaran potensi wisata tiap tahunnya yang ada di desa wisata kandri dengan menampilkan hasil kerajinan, kuliner, pertunjukan seni budaya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk lebih memperkenalkan potensi dan menarik pengunjung dari berbagai kalangan.
 - b. Terkait ketersediaan lahan parkir dan tempat sentralisasi UMKM yang kurang perlu dilakukan pemanfaatan lahan yang ada, apabila di sekitar Desa Wisata Kandri ada tanah milik negara atau Pemerintah Kota Semarang yang belum dimanfaatkan pemerintah dapat memberikan izin kepada pokdarwis untuk mengelola tanah tersebut dan apabila ada tanah kosong milik warga yang tidak dimanfaatkan hendaknya para pengurus pokdarwis mengajak kerjasama guna memanfaatkan tanah miliknya dengan sistem bagi hasil atau kontrak.
 - c. Terkait terbatasnya jumlah SDM Disbudpar khususnya pada seksi

- bimbingan masyarakat agar bisa maksimal dalam memberikan pembinaan dengan ikut menghadirkan para juru didik atau para penerampil yang telah mempunyai *track record* di bidang pariwisata dan melibatkan pula para pakar terutama dalam hal *guiding* dan *hospitality*.
- d. Dari segi anggaran pemerintah wajib mengagendakan pelaksanaan kegiatan pelestarian pokdarwis sebagai salah satu prioritas yang harus ditangani, misalnya dalam bentuk alokasi penganggaran keuangan khusus untuk pengembangan desa wisata serta pemanfaatan secara maksimal dana-dana yang ada di masyarakat seperti CSR, dana hibah bantuan dari sponsor. Selain itu pokdarwis lebih bisa menggandeng pihak swasta untuk dijadikan sebagai sponsor dalam kegiatannya.
 - e. Terkait peraturan AD/ART yang sudah ada lebih diaplikasikan lagi pelaksanaannya oleh semua anggota pokdarwis dan bagi yang melanggar bisa ditindak secara tegas dan diberikan sanksi berupa peringatan atau denda. Selain itu pokdarwis harus selalu intens dalam memberikan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat pada saat ada pertemuan rutin bulanan RT, RW atau agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Akib, Haedar; Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan; Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong, Lexi J. 2010. *Metodelogi Gabungan Kuantitatif Kualitatif dan Analisis Data*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Dr. Riant. 2014. *Publilc Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputin.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono, Drs. AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : Buku Seru.

Sumber Lain :

- Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan

- Ekonomi Kreatif. 2008. Buku Pegangan Penatar dan Penyuluhan Kepariwisata Indonesia. Jakarta.
- Direktur Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2014. Buku Petunjuk Teknis Sadar Wisata. Jakarta.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 2015. Buku Pedoman Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Semarang.
- Yohanes R. 2015. *Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Perundang-undangan :**
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata,
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah No.556/01515/2010 tanggal 10 Januari 2010 tentang himbuan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.
- Sumber Internet :**
- Tiara. 2014. *Progam Pokdarwis*. Jurnal Universitas Diponegoro dalam <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/7233/0> (diakses pada tanggal 07 Oktober 2015).
- <http://desawisatakandri.blogspot.co.id/> (diakses pada tanggal 18 November 2015)
- <http://beta.semarangkota.go.id/content/image/files/3.%20Bab%20III%20LPPD%202013%20-%204-2.pdf> (diakses pada tanggal 15 November 2015)
- <http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/05/Jurnal%20%2805-12-14-06-12-00%29.pdf> (diakses pada tanggal 15 November 2015)
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197901012005011-NANDI/artikel%20jurnal/Artikel_di_Jurnal_GEA.pdf__Pariwisata_dan_Sumber_daya_Manusia.pdf (diakses pada tanggal 18 November 2015)
- <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpcb70a6a9dcfull.pdf> (diakses pada tanggal 16 Desember 2015)